



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYIAR RIFAI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 85125

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.205.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/54 m² di TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m²/90 m² di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 686 m²/100 m² di BOYOLALI, LAINNYA Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 141.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
7. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
8. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



11.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.700.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	769.349.279
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.156.549.279
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.156.549.279

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.